



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

Analisis Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDRB), Belanja Modal dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Agam

SKRIPSI



SHEFRI DONALDY
06151108

JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ANDALAS

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Dengan ini Dekan Fakultas Ekonomi, Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi, dan Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa :

Nama : **SHEFRI DONALDY**

No.BP : **06 151 108**

Program Studi : **Ekonomi Pembangunan**

Jurusan : **Ilmu Ekonomi**

Judul Skripsi : **Analisa Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Belanja Modal dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Agam**

Telah diseminarkan pada tanggal 25 Agustus 2010 dan telah disetujui dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Padang, Oktober 2010

Pembimbing Skripsi

Masrizal, MC, MSoc

NIP. 195802111987021003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Andalas

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi

Universitas Andalas

Prof.Dr.H.Syafruddin Karimi, SE,MA

NIP. 195410091980121001

Prof.Dr.H.Firwan Tan, SE,M.Ec.DEA.Ing

NIP. 130.812.952

*Bukankah kami telah lapangkan dadamu, dan kami telah menghilangkan dari
padamu bebanmu yang memberatkan punggungmu.*

*Sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari
suatu urusan). Kerjakanlah dengan sungguh2 (urusan yang lain)*

Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap

(QS. Alam NasyRah : 1 – 8)

Alhamdulillahirobbil Alamin

Rasa syukur yang begitu besar kurasakan

Atas nikmat dan karunia-Mu ya Allah

Dan berkat Ridho dan izin-Mu juaLah

Sebuah harapan dan impian ku telah terwujud

Sebagai bekal bagiku untuk meniti hari esok yang masih panjang.

Setetes kebahagiaan ku persembahkan untuk semua

Terimalah karya kecilku ini sebagai sumbangsihku

Atas semua jerih payahku

Maka izinkanlah aku bersimpuh

Bersujud dan bersyukur atas kehadiranMu ya Allah.

Ku persembahkan karya kecilku kepada orang tuaku

Ayahku dan ibundaku tercinta

Doa'mu menentramkan hatiku

Setiap harapanku disinari dengan kasih sayangmu yang tulus

Berkat semua jerih payah dan perjuanganmu

Aku bisa menggapai semua impianku

Dan tiada kata yang dapat aku ucapkan

Selain rasa terima kasih yang tak terhingga

Serta tawa kebahagiaan yang ingin selalu kulihat dari wajahmu

Ayah..... Bunda.....

Kesabaranmu adalah keteladananku

Harapanmu adalah tujuanku

Bayanganmu menjadi pelita dan cahaya hidupku

Doa'mu adalah penuntunku

Aku akan berusaha menjadi yang terbaik

Dan yang akan membahagiakanmu

Ayah..... Bunda.....

Terimalah goresan ini, setetes keringat sebagai bukti atas pengorbanan,

Perhatian dan kasih sayang yang telah kau berikan

Serta dalam doa mengiringi langkahku untuk meraih keberhasilan ini

Menjadi langkah awal dalam meraih cita-cita dan sebuah harapan

Dari awal sebuah masa depan

Juga buat sahabat-sahabatku...

Keindahan yang kita ciptakan

Kebahagiaan yang kita nikmati

Suka dan duka kita rasakan

Ku tak ingin semua ini terhenti

Jangan pernah mengingkari persahabatan

Meski perpisahan harus terjadi

Sahabat Aku bangga pada kalian semua

With Love

Shefri Donaldy, SE



No. Alumni
Universitas

SHEFRI DONALDY

No. Alumni Fakultas

BIODATA

a) Tempat/tanggal lahir : Bukittinggi / 23 September 1988 b) Nama Orang Tua : Amzar Madmur & Erna Lida c) Fakultas : Ekonomi d) Jurusan : Ilmu Ekonomi e) NO BP : 06151108 f) Tanggal Lulus : 25 Agustus 2010 g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h) IPK : 3,30 i) Lama Studi : 4 Tahun h) Alamat Orang Tua : Jl. Pudingmas No.23 RT 01 RW 04 Aur Kuning, Bukittinggi.

Analisa Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Belanja Modal dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Agam

Skripsi S1 oleh: Shefri DonalDY Pembimbing Skripsi: Masrizal, Mc. MSoc

Abstrak

Skripsi ini membahas tentang pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Belanja Modal dan Kebijakan Pemerintah terhadap kemiskinan di Kabupaten Agam yang meliputi periode tahun 1999 hingga tahun 2008. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Belanja Modal, dan Kebijakan Pemerintah dalam mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten Agam. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode OLS (Ordinary Least Square), yakni analisis regresi berganda untuk melihat bagaimana pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap kemiskinan di Kabupaten Agam. Data yang digunakan adalah data tahunan PDRB, total Belanja modal, dan kebijakan kemiskinan di Kabupaten Agam. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang negatif antara PDRB terhadap angka kemiskinan, terdapat hubungan yang negatif antara Belanja modal terhadap kemiskinan dan pengaruh yang positif antara Kebijakan Kemiskinan terhadap kemiskinan di Kabupaten Agam. Ketiga Variabel tersebut signifikan mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten Agam. Oleh sebab itu diperlukan peran Pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Agam, serta peran masyarakat dalam mendukung program-program ataupun kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Agam.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal : 25 Agustus 2010

Abstrak telah disetujui oleh :

Tanda Tangan	1.	2.	3.
Nama Terang	Masrizal, MC, MSoc	Yulia Anas, SE, MSi	Lukman, SE, MSi

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Prof. Dr. H. Firwan Tan, SE, M.Ec. DEA. Ing

NIP. 130 812 952

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke fakultas/universitas dan mendapat nomor alumnus :

Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama Tanda Tangan
No. Alumni Universitas	Nama Tanda Tangan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul **Analisis Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDRB), Belanja Modal dan Kebijakan Pemerintah terhadap Kemiskinan di Kabupaten Agam Periode 1999 – 2008** ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam tidak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW.

Selama proses penulisan skripsi ini, penulis juga menghadapi berbagai kendala. Semua kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan dan bimbingan tersebut, yaitu dari :

1. Bapak Dr. Syafruddin Karimi, SE, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas ;
2. Bapak Masrizal, MC, MSoc, selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberi petunjuk, saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini ;
3. Bapak Prof. DR. H. Firwan Tan, SE, M.Ec, DEA.Ing selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Andalas ;
4. Ibu Yulia Anas SE, MSi dan Bapak Lukman SE, Msi selaku tim pembahas yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini ;

5. Seluruh dosen yang mengabdikan pada Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu ;
6. Bapak dan Ibu karyawan biro Jurusan Ilmu Ekonomi dan pegawai Dekanat Fakultas Ekonomi yang telah membantu proses kelancaran administrasi selama penulis kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas ;
7. Kedua orang tuaku tercinta bapak Amzar Madmur dan ibu Erna Lida serta Apa Suherman dan Ama Elizarbet yang begitu sabar membesarkan dan membimbing penulis serta memberikan semangat, dorongan dan doa kepada penulis serta kepada saudara-saudaraku yang selalu berada dalam kecintaan dan kasih sayang. Semoga kita selalu berada di bawah naungan ridho illahi ;
8. Bunda Sutria, Amd yang selalu memberikan doa dan support kepada penulis hingga mencapai gelar sarjana ini.
9. Sahabatku Vitamin (Anzeer, Titin, Ica, Vq, Minda) yang telah memberikan suasana kondusif, support, dan semangat sehingga penulis bisa nyaman dan lebih fokus dalam penulisan skripsi ;
10. Sahabat-sahabatku Seperjuangan di Ekonomi Pembangunan, para pier2, pier kula dan d_cuka's Company (Eva, Naila, Yossi, Wilda, Ica Bukik) terima kasih buat semua support, semangat, dan dukungannya selama ini, Bersama kita Bisa! Rafiko, Bang Ijal, Rd, Riko, Alfin, thanks juga Prend atas support, bantuan, dan spiritnya serta bantuan

transportasinya sehingga skripsi ini bisa selesai dan bisa diwisuda pada waktu yang tepat, Smangad dan sukses buat kita semua Prend.

11. Semua teman-teman di IE Durian (Bro Yopi, Surya, Oki Pras, Oki mus, Oki Oktav, Deni, Ade, Baron,) thanks Bro atas semua bantuan, dukungan dan transportasinya dalam menyelesaikan semua urusan di kampus, Smangad temand dan jangan menyerah, perjalanan masih panjang.

12. Semua teman-teman extensi hukum, Dika, Tasya, Ojik, Yogi, Gatoik, Niko, Karlos, Dian, Trimakasih atas segala bantuan support, smangat, dan kebersamaan selama menjalankan perkuliahan dan telah menjadi teman sepermainan, sukses untuk kita semua!

13. Seluruh Kakak-kakak Alumni Jurusan Ilmu Ekonomi Angkatan 2004,2005 serta adik-adik satu jurusan, terima kasih atas dukungan dan bantuannya selama ini, sukses juga buat kalian semua.

Meskipun demikian, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritk dan saran dari pembaca sehingga skripsi ini dapat lebih bermanfaat.

Padang, Oktober 2010

Penulis

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Hipotesis	8
1.6 Ruang Lingkup Penelitian.....	8
1.7 Sistematika Penulisan	9
BAB II KERANGKA TEORI DAN TINJAUAN LITERATUR	
2.1 Kerangka Teori	11
2.1.1 Konsep Kemiskinan	11
2.1.1.1 Ukuran Kemiskinan	13
2.1.2 Konsep PDRB	16
2.1.3 Konsep Belanja Modal	19
2.1.4 Konsep Kebijakan Pemerintah	23
2.2 Tinjauan Literatur	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	

3.1 Data dan Sumber Data	31
3.2 Metode Analisa	31
3.2.1 Pembentukan Model	31
3.2.2 Definisi Operasional	33
3.3 Teknik Analisa	35
3.3.1 Analisa Deskriptif	35
3.3.2 Analisa Kuantitatif	35
3.4 Metode Analisis dan Pengolahan Data	35
3.5 Pengujian Model	36

BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1 Keadaan Geografis Kabupaten Agam	40
4.1.1 Kondisi Fisiografis	40
4.1.2 Kondisi Topografi	41
4.1.3 Kondisi Demografi	41
4.2 Kondisi Perekonomian	42
4.3 Jumlah Penduduk Miskin	42
4.4 Pertumbuhan PDRB	45
4.5 Pertumbuhan Belanja Modal	47
4.6 Kebijakan Kemiskinan	49

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil dan Persamaan Regresi	53
5.1.1 F-Test	54
5.1.2 T-Test	55

5.2 Hasil Uji Asumsi Klasik	56
5.2.1. Uji Multikolinieritas	56
5.2.2 Uji Autokorelasi	57
5.2.3. Uji Heteroskedastisitas	57
5.3 Implikasi dan kebijakan	58

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan	61
6.2 Saran	62

Daftar Pustaka

lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1: Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin (JPM)Kabupaten Agam ..43	
Tahun 1999 – 2008	
Tabel 4.2: Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB	46
Berdasarkan harga konstan (2000= 100) Kabupaten Agam Tahun	
1999 – 2008	
Tabel 4.3: Perkembangan Belanja Modal (BM) Kabupaten Agam Tahun	48
1999 – 2008	
Tabel 5.1: Hasil Uji Multikolinieritas.....	56

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1: Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin (JPM) Kabupaten Agam ..44

Tahun 1999 – 2008

Grafik 4.2: Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)46

Berdasarkan harga konstan (2000= 100) Kabupaten Agam

Tahun 1999 – 2008

Grafik 4.3: Perkembangan Belanja Modal (BM) Kabupaten Agam48

Tahun 1999 – 2008

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Kemiskinan juga merupakan masalah global yang juga dihadapi negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Istilah "negara berkembang" biasanya digunakan untuk merujuk kepada negara-negara yang "miskin". Begitupun kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan , pakaian , tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup . Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara.

Di Sumatera Barat khususnya di Kabupaten Agam tingkat kemiskinan juga semakin meningkat. Hal ini dilihat dari bertambahnya angkatan kerja namun

kesempatan kerja tidak tersedia sehingga menciptakan semakin banyaknya angka pengangguran yang selanjutnya menambah angka kemiskinan. Padahal banyak sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi angka pengangguran sekaligus mengurangi angka kemiskinan, namun semuanya itu terkendala oleh faktor modal yang tidak dimiliki oleh masyarakat ekonomi lemah yang berada di kabupaten ini.

Di Kabupaten Agam, jumlah angka kemiskinan diperoleh data bahwa tahun 1999 dan 2000 terdapat penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 3.100 jiwa, dimana pada tahun 1999 jumlah penduduk miskin di kabupaten Agama berjumlah 54.500 jiwa, dan mengalami penurunan menjadi 51.400 pada tahun 2000. Pada tahun 2001 dan 2002 terdapat penurunan jumlah masyarakat miskin sebanyak 9.280 jiwa. Sedangkan dari 2002 sampai tahun 2005 terjadi peningkatan sebanyak 2.500 jiwa. Dari informasi yang diperoleh, penyebab kemiskinan tersebut adalah ketiadaan modal untuk bekerja. Dari tahun 2006 sampai tahun 2007 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 8.300 jiwa, yakni berjumlah 59.400 jiwa pada tahun 2006, dan pada tahun 2007 menjadi 51.100 jiwa. Dari tahun 2007 hingga tahun 2008 terjadi penurunan kemiskinan yang cukup signifikan yakni sebesar 5.800 jiwa, namun pada tahun 2009 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Agam kembali meningkat sebesar 9.600 jiwa.

Dalam konteks upaya penanggulangan kemiskinan, dibutuhkan perubahan paradigma pembangunan dari *top down* menjadi *bottom up*, dengan memberi peran masyarakat sebagai aktor utama atau subyek pembangunan sedangkan

pemerintah sebagai fasilitator. Proses *bottom up* akan memberi ruang bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam merencanakan, menentukan kebutuhan, mengambil keputusan, melaksanakan, hingga mengevaluasi pembangunan (Agussalim, 2005).

Melalui cara ini, peran serta masyarakat dapat menggerakkan perekonomian mikro, kecil dan menengah yang secara langsung juga ikut mendorong pertambahan hasil produksi dan secara langsung akan mempengaruhi pertumbuhan PDRB. Pertumbuhan PDRB yang positif memperlihatkan pertumbuhan pendapatan per kapita dari daerah tersebut juga positif. Hal ini nantinya akan menurunkan angka kemiskinan melalui peningkatan distribusi pendapatan dari masing-masing rumah tangga.

Proses pembangunan memerlukan *Gross National Product (GNP)* yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Dibanyak negara syarat utama bagi terciptanya penurunan kemiskinan yang konstan adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi memang tidak cukup untuk mengentaskan kemiskinan namun, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sangat dibutuhkan dan sangat membantu dalam pengentasan kemiskinan. Walaupun begitu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil pun menjadi tidak akan berarti bagi masyarakat miskin jika tidak diiringi dengan penurunan yang tajam dalam pendistribusian atau pemerataan pendapatan.

Selain itu dalam pengentasan permasalahan kemiskinan tersebut diperlukan adanya program yang efektif, efisien, dan terpadu serta berorientasi

pada kemandirian dan berkelanjutan. Pelaksanaan sistem penanggulangan kemiskinan secara statis, melalui program kompensasi, bantuan langsung pangan, voucher pelayanan minimum kesehatan dan pendidikan, hanya dapat memecahkan persoalan kemiskinan jangka pendek (World Development Report, 2004). Karena, pada telah berakhirnya pelaksanaan program tersebut ternyata masih banyak masyarakat miskin yang bergantung pada alokasi bantuan tersebut. Bisa dikatakan bahwa, masyarakat sangat bergantung pada program bantuan tersebut dan menjadi tidak produktif dalam dunia usaha. Masih tingginya jumlah penduduk miskin dewasa ini membuat Pemerintah terpaksa harus bekerja keras untuk mewujudkan target tersebut. Apalagi dalam situasi inflasi sekarang yang mengakibatkan daya beli masyarakat cenderung turun, upaya pengentasan kemiskinan menjadi suatu pekerjaan yang bersifat urgen dan harus segera dilaksanakan.

Oleh karena itu, bentuk tanggung jawab pemerintah dalam pengentasan kemiskinan tidak hanya berhenti sampai pada program tersebut diatas. Namun juga melalui belanja modal yang ditujukan pada instansi pemerintah daerah otonom guna membangun infrastruktur bagi masyarakat. Dari belanja modal oleh pemerintah ini diharapkan nantinya pemerintah daerah otonom dapat menyediakan layanan bagi publik, penyerapan tenaga kerja, dan mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah.

Fakta menarik yang diungkapkan oleh Bank Dunia dalam *World Development Report 2003*, telah memicu debat menjadi kian ekstensif. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa diberbagai belahan dunia, sejumlah negara telah mencatat laju pertumbuhan ekonomi yang cukup mengesankan dan bahkan

berlangsung secara konsisten dalam satu-dua dekade, namun pertumbuhan ekonomi tersebut ternyata tidak serta merta mereduksi kemiskinan. Disebutkan bahwa sedikitnya 3 (tiga) milyar penduduk bumi masih berada dalam kemiskinan (hanya memperoleh pendapatan kurang dari US\$ 2 per hari).

Di Indonesia, masalah kemiskinan juga tampil secara massif (pertambahan angka kemiskinan yang berlangsung secara terus menerus). Jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 2004 relatif masih tinggi, yaitu 36 juta atau 17% dari total penduduk. Bahkan jika menggunakan garis kemiskinan US\$ 2 per hari, diperkirakan angka kemiskinan berada diatas 30% (setiap 3 orang terdapat 1 orang miskin). Selain itu, angka kemiskinan juga tampak sangat rentan terhadap goncangan krisis. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 menyebabkan jumlah penduduk miskin meningkat secara tajam dan berjuta-juta penduduk kembali masuk ke jurang kemiskinan. Pada tahun 1998, jumlah penduduk miskin meningkat lebih dari dua kali lipat dari tahun 1996 menjadi sekitar 49,5 juta jiwa atau 24,2% dari total penduduk (BPS, 1999).

Menurut Rasidi K. Sitepu dan Bonar Sinaga (2007), kemiskinan muncul karena ketidakmampuan masyarakat dalam menyelenggarakan hidupnya hingga taraf yang dianggap manusiawi. Hal ini menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia sehingga produktivitas dan pendapatannya rendah. Lingkaran kemiskinan terus terjadi karena pendapatan yang rendah tidak mampu menciptakan tabungan dari masyarakat hingga selanjutnya mengalami kesulitan untuk mengakses pendidikan, mendapatkan layanan kesehatan dan nutrisi yang baik sehingga menyebabkan kualitas sumber daya manusia dan fisik serta

produktivitas rendah. Selain itu, rendahnya sumber daya manusia tersebut menyebabkan kelompok ini tersisih dari persaingan ekonomi, sosial budaya, maupun psikologi sehingga semakin sulit untuk mendapatkan kesempatan yang baik dalam sistem ekonomi sosial masyarakat. Hal ini menjadi suatu tantangan besar bagi pemerintah untuk membawa masyarakat miskin Indonesia keluar dari lingkaran setan kemiskinan itu khususnya bagi pemerintah daerah Kabupaten Agam.

Sumatera Barat termasuk daerah yang tingkat kemiskinannya cukup tinggi di Indonesia yaitu sekitar 11,9% (sejumlah 529.200 orang) pada tahun 2007. Namun bila dibandingkan dengan tahun 2006 telah berkurang 21.051 orang, atau hanya turun sebesar 0,6% (BPS, 2007). Penurunan yang tidak begitu besar menjadikan masalah kemiskinan selalu menjadi sorotan utama dalam agenda pembangunan Sumatera Barat umumnya dan Kabupaten Agam khususnya .

Dari uraian diatas telah dijelaskan adanya bentuk investasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya untuk mengentas kemiskinan di Indoensia. Dalam membantu masyarakat miskin, pemerintah tidak sepenuhnya memberikan investasi langsung kepada masyarakat. Namun lebih memilih untuk melatih masyarakat untuk dapat menggerakkan perekonomiannya sendiri agar nantinya mampu membawa keluarganya keluar dari lingkaran kemiskinan tersebut.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kabupaten Agam”**.

1.2 Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang diatas maka permasalahan yang akan menjadi objek penelitian penulis yaitu untuk melihat bagaimana pengaruh PDRB Kabupaten Agam, belanja modal pemerintah Kabupaten Agam, dan kebijakan pemerintah Kabupaten Agam terhadap kemiskinan di Kabupaten Agam Sumatera Barat.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah yang dijelaskan diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh PDRB Kabupaten Agam terhadap kemiskinan di Kabupaten Agam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh belanja modal pemerintah Kabupaten Agam terhadap kemiskinan di Kabupaten Agam.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kebijakan pemerintah Kabupaten Agam terhadap kemiskinan di Kabupaten Agam.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Mengetahui perkembangan PDRB Kabupaten Agam tahun 1999-2008.
2. Mengetahui perkembangan belanja modal pemerintah dan kemiskinan selama 10 tahun (1999-2008) di Kabupaten Agam.

3. Mengetahui bentuk-bentuk kebijakan pemerintah Kabupaten Agam dalam mengentaskan kemiskinan.
4. Mengetahui hubungan antara PDRB, belanja modal dan kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan di Kabupaten Agam.
5. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah terkait dalam membuat kebijakan yang berhubungan dengan masalah kemiskinan.

1.5 Hipotesis

Adapun hipotesa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga terdapat hubungan yang negatif dan signifikan antara PDRB terhadap kemiskinan di Kabupaten Agam.
2. Diduga terdapat hubungan yang negatif dan signifikan antara belanja modal pemerintah terhadap kemiskinan di Kabupaten Agam.
3. Diduga terdapat hubungan yang negatif signifikan antara kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan di Kabupaten Agam.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini memfokuskan kepada faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan yaitu PDRB, Belanja Modal dan kebijakan pemerintah di Kabupaten Agam. Penelitian ini dilakukan di daerah Kabupaten Agam, dimana data yang digunakan adalah *time series* selama periode 1999-2008.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi ke dalam enam bab dengan rincian tiap bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, hipotesis dan sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI DAN STUDI LITERATUR

Berisikan pendekatan teori dan menyajikan penelitian terdahulu yang akan menjadi tinjauan literatur dalam penelitian ini.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Berisikan metode analisi data, hipotesis, data dan sumber data, serta variable dan definisi operasional.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Berisikan gambaran umum dan perkembangan beberapa variabel yang digunakan yaitu PDRB, belanja modal dan kebijakan pemerintah.

BAB V : TEMUAN EMPIRIS

Berisikan hasil penelitian dan implikasi kebijakan. Hasil penelitian berupa kajian tentang adanya PDRB, belanja modal, kebijakan pemerintah dan angka kemiskinan di Kabupaten Agam. Temuan empiris berupa pengaruh PDRB, belanja modal

pemerintah dan kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan di
Kabupaten Agam.

BAB VI : PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

BAB II

KERANGKA TEORI DAN STUDI LITERATUR

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Konsep Kemiskinan

Definisi kemiskinan banyak ditemui didalam berbagai literatur ekonomi dan didefinisikan serta dikembangkan oleh pemerintah suatu negara . Misalnya Bapenas dalam buku panduan Desa tertinggal 1993 menyatakan kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh simiskin, melainkan karena tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya.

Menurut Hendra Esmara, kemiskinan sebagai gejala ekonomi akan berbeda kemiskinan sebagai gejala sosial. Kemiskinan sebagai gejala ekonomi merupakan suatu gejala yang terjadi disekitar lingkungan penduduk miskin dan biasanya dikaitkan dengan masalah kekurangan pendapatan. Sebaliknya kebudayaan kemiskinan lebih banyak terletak dalam diri penduduk miskin itu sendiri seperti cara hidup , tingkah laku dan sebagainya. (Esmara ,1986)

Kemiskinan dapat dibedakan dalam empat bentuk :

1. Kemiskinan Absolut

Orang yang dikatakan miskin absolut apabila tingkat pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal, antara lain pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk

bisa hidup dan bekerja. Konsep ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup. (Todaro, 2000)

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. (BPS, 2008)

3. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan yang diakibatkan oleh faktor-faktor adat dan budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang tetap melekat pada indikator kemiskinan. Mengacu kepada persoalan sikap seseorang, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, dan pemboros.

4. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan yang ditengarai atau didalihkan berasal dari kondisi struktur, atau tatanan kehidupan yang tidak menguntungkan.

Kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan (*artificial*).

1. Kemiskinan Alamiah berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam dan prasarana umum, serta keadaan tanah yang tandus.
2. Kemiskinan buatan lebih banyak diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat menguasai sumber daya, dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata.

Menurut BPS (2008), penduduk miskin dibedakan jadi dua yaitu miskin kronis (*crhonic poor*) dan miskin sementara (*transiet poor*). Miskin kronis adalah penduduk miskin yang berpenghasilan jauh dibawah garis kemiskinan dan biasanya tidak memiliki akses yang cukup terhadap terhadap sumber daya ekonomi, sedangkan miskin sementara adalah penduduk miskin yang berada dekat garis kemiskinan. Jika terjadi sedikit saja perbaikan dalam ekonomi, kondisi penduduk yang termasuk kategori miskin sementara ini bisa meningkat dan statusnya berubah menjadi penduduk tidak miskin.

2.1.1.1 Ukuran Kemiskinan

Kajian mengenai kemiskinan telah sangat banyak dilakukan , dan dari kajian tersebut muncul istilah penduduk miskin, kemiskinan pedesaan (*rural poverty*) dan kemiskinan perkotaan (*urban poverty*). Istilah tersebut sering digunakan dalam satu pengertian yaitu penduduk yang menderita miskin.

Untuk membedakan penduduk miskin dengan penduduk tidak miskin biasanya digunakan garis pembatas yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*). Penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan inilah yang disebut dengan penduduk miskin (Quibria,1991 dan Esmara 1992 dalam Yakub 2004). Di dalam berbagai literatur ekonomi, penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan disebut juga dengan kemiskinan absolute (*absolute poverty*).

Batas garis kemiskinan yang dipakai di Indonesia adalah jumlah minimum pengeluaran konsumsi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang ditunjukkan dalam rupiah/kapita/bulan (BPS, 2008). Dengan demikian apabila

seseorang atau keluarga berada di bawah garis kemiskinan, sehingga jumlahnya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup minimumnya, maka orang atau keluarga tersebut disebut miskin absolute. (Arsyad, 1997)

Kebutuhan dasar dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan yaitu kebutuhan dasar yang diperlukan sekali untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan kebutuhan lain yang lebih tinggi. *United National Research Institute for Sosial Development (UNSRID)* menggolongkan kebutuhan dasar atas 3 (tiga) kelompok. Pertama, kebutuhan fisik primer yang terdiri dari kebutuhan gizi, perumahan dan kesehatan. Kedua, kebutuhan cultural yang terdiri dari pendidikan, waktu luang, dan rekreasi dan ketenangan hidup. Ketiga, kelebihan pendapatan untuk mencapai kebutuhan yang lebih tinggi. Garis kemiskinan yang telah ditetapkan selama ini dihitung dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan, pendekatan produksi, pendapatan, dan pengeluaran. Garis kemiskinan produksi dan pendapat sulit dikumpulkan datanya, sehingga garis kemiskinan ditentukan dengan pendekatan pengeluaran.

Di Indonesia garis kemiskinan yang dipakai adalah garis kemiskinan yang dikeluarkan BPS. Menurut BPS garis kemiskinan dinyatakan sebagai besarnya rupiah yang dikeluarkan atau dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang disetarkan dengan 2100 kalori per kapita per hari ditambah dengan pemenuhan kebutuhan pokok minimum lain seperti sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, angkutan dan bahan bakar. Besarnya pengeluaran per kapita perhitungan garis kemiskinan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan pedesaan.

Kebutuhan lainnya selain makanan meliputi perumahan (penerangan bahan bakar, dan air bersih), pakaian, barang tahan lama, dan jasa. Untuk pengeluaran jenis makanan, BPS tidak terpaku pada salah satu jenis makanan seperti beras sebagai patokan. Dengan demikian nilai uang dari jumlah kalori dihitung berdasarkan rasio konsumsi makanan terhadap konsumsi rumah tangga total sehingga diperoleh konsumsi total minimum yang dianggap sebagai garis batas kemiskinan. Kriteria ini ditetapkan sejak tahun 1976 sampai sekarang dan terus mengalami peningkatan seiring dengan kenaikan harga barang.

Menurut Sayogyo (dalam Yakub, 2004) mengklasifikasikan tingkat kemiskinan berdasarkan besarnya pengeluaran per kapita per tahun setara dengan harga beras yaitu:

1. Miskin, apabila pengeluaran keluarga lebih rendah dari pada 320 kg nilai tukar beras per orang per tahun untuk daerah pedesaan dan 480 kg untuk daerah perkotaan.
2. Miskin sekali, apabila pengeluaran keluarga lebih kecil dari pada 240 kg nilai tukar beras per orang per tahun untuk daerah pedesaan dan 360 kg untuk daerah perkotaan.
3. Paling miskin, apabila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 180 kg nilai tukar beras per orang per tahun untuk daerah pedesaan dan 270 kg untuk daerah per kapita.

2.1.2 Konsep PDRB

Pengertian PDRB menurut Badan Pusat Statistik (2004) yaitu jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Penghitungan PDRB dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu langsung dan tidak langsung (alokasi).

1. Metode Langsung

Penghitungan metode langsung ini dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Walaupun mempunyai tiga pendekatan yang berbeda namun akan memberikan hasil penghitungan yang sama (BPS, 2004). Seperti dikatakan di atas, penghitungan PDRB secara langsung dapat dilakukan melalui tiga pendekatan sebagai berikut :

a) PDRB Menurut Pendekatan Produksi (*Production Approach*)

PDRB adalah jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi (di suatu region) pada suatu jangka waktu tertentu (setahun). Perhitungan PDRB melalui pendekatan ini disebut juga penghitungan melalui pendekatan nilai tambah (*value added*). Pendekatan produksi adalah penghitungan nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu kegiatan/sektor ekonomi dengan cara mengurangkan biaya antara dari total produksi bruto sektor atau sub sektor tersebut. Nilai tambah merupakan selisih antara nilai produksi dan nilai biaya antara.

Biaya antara adalah nilai barang dan jasa yang digunakan sebagai input antara dalam proses produksi. Barang dan jasa yang termasuk input antara adalah bahan baku atau bahan penolong yang biasanya habis dalam sekali proses produksi atau mempunyai umur penggunaan kurang dari satu tahun, sementara itu pengeluaran atas balas jasa faktor produksi seperti upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan yang diterima perusahaan bukan termasuk biaya antara. Begitu juga dengan penyusutan dan pajak tidak langsung netto bukan merupakan biaya antara. (Tambunan, 2001)

Pendekatan produksi banyak digunakan untuk memperkirakan nilai tambah dari sektor yang produksinya berbentuk fisik/barang. PDRB menurut pendekatan produksi terbagi atas 9 lapangan usaha (sektor) yaitu : pertanian; pertambangan dan penggalan; industri pengolahan; listrik, gas dan air minum; bangunan dan konstruksi; perdagangan, hotel dan restoran; angkutan dan komunikasi; bank dan lembaga keuangan lainnya; jasa-jasa. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan PDRB menurut pendekatan produksi. (Suryana, 2000)

b) PDRB Menurut Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)

PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut dalam proses produksi di suatu wilayah pada jangka waktu tertentu (setahun). Penghitungan PDRB melalui pendekatan ini diperoleh dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima faktor produksi yang komponennya terdiri dari upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan ditambah dengan penyusutan dan pajak tidak langsung netto. (BPS, 2004).

c) PDRB Menurut Pendekatan Pengeluaran (*Expend. Approach*).

PDRB adalah jumlah seluruh pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok dan ekspor netto di suatu wilayah. Perhitungan PDRB melalui pendekatan ini dilakukan dengan bertitik tolak dari penggunaan akhir barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik. (BPS, 2004)

2. Metode Tidak Langsung atau Metode Alokasi

Dalam metode ini PDRB suatu wilayah diperoleh dengan menghitung PDRB wilayah tersebut melalui alokasi PDRB wilayah yang lebih luas. Untuk melakukan alokasi PDRB wilayah ini digunakan beberapa alokator antara lain: Nilai produksi bruto atau netto setiap sektor/subsektor pada wilayah yang dialokasikan ; jumlah produksi fisik; tenaga kerja; penduduk, dan alokator tidak langsung lainnya. Dengan menggunakan salah satu atau beberapa alokator dapat diperhitungkan persentase bagian masing-masing propinsi terhadap nilai tambah setiap sektor dan subsektor.

Cara penyajian PDRB adalah sebagai berikut :

- a) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang berlaku pada masing-masing tahunnya, baik pada saat menilai produksi dan biaya antara maupun pada penilaian komponen PDRB. PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Nilai PDRB yang besar

menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.

- b) PDRB Atas Dasar Harga Konstan, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga tetap, maka perkembangan agregat pendapatan dari tahun ke tahun semata-mata karena perkembangan produksi riil bukan karena kenaikan harga atau inflasi. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.

2.1.3 Belanja Modal

Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoretis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan asset tetap lain, dan membeli. Namun, untuk kasus di pemerintahan, biasanya cara yang dilakukan adalah dengan cara membeli. Proses pembelian yang dilakukan umumnya dilakukan melalui sebuah proses lelang atau tender yang cukup rumit.

Menurut Halim (2004), belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menimbulkan konsekuensi menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Munir juga menyatakan menyatakan hal senada. Belanja modal memiliki karakteristik spesifik yang menunjukkan adanya berbagai pertimbangan dalam penegalokasiannya. Pemerolehan asset tetap juga memiliki

konsekuensi pada beban operasional dan pemeliharaan pada masa yang akan datang (Bland & Nunn, 1992).

Alokasi belanja modal yang didasarkan pada kebutuhan memiliki arti bahwa tidak semua satuan kerja atau unit organisasi di pemerintahan daerah melaksanakan kegiatan atau proyek pengadaan aset tetap. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing satuan kerja, ada satuan kerja yang memberikan pelayanan publik berupa penyediaan sarana dan prasarana fisik, seperti fasilitas pendidikan (gedung sekolah, peralatan laboratorium, mobiler), kesehatan (rumah sakit, peralatan kedokteran, mobil ambulans), jalan raya, dan jembatan, sementara satuan kerja lain hanya memberikan pelayanan jasa langsung berupa pelayanan administrasi (catatan sipil, pembuatan kartu identitas kependudukan), pengamanan, pemberdayaan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan pendidikan.

Belanja modal berbeda dengan belanja operasional dan pemeliharaan dalam hal pembuatan keputusan. Anggaran operasional dan pemeliharaan melibatkan para eksekutif, bagian anggaran, dan pimpinan dinas, badan, bagian, dan kantor, sementara belanja modal, terutama infrastruktur sangat tergantung pada masukan dari insinyur, arsitek, dan perencanaan. Di sisi lain pembiayaan untuk kedua anggaran tersebut juga berbeda. Belanja modal pada umumnya berasal dari dana bantuan (*fund*), sedangkan pendanaan untuk belanja operasional cenderung bersumber dari pendapatan, misalnya biaya pelayanan (*service charges*) dan pajak yang dibebankan kepada masyarakat. Perbedaan yang lain adalah anggaran operasional biasanya dirancang untuk satu tahun belanja,

sementara kebanyakan anggaran modal untuk beberapa periode atau tahun anggaran. (Bland dan Nunn, 1992)

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002, belanja modal dibagi menjadi:

- a. Belanja Publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum.
- b. Belanja aparatur, yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur.

Belanja Modal dapat dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama:

- a. Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

e. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.
(Syaiiful, 2006)

2.1.4 Teori Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah merupakan wahana dari suatu pemerintah untuk secara rasional menguasai dan mengemudikan aktivitas-aktivitas sosial. Kegiatan-kegiatan dari kebijakan pemerintahan berwujud dalam kegiatan mengatur dan mengarahkan masyarakat, antara lain dengan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan, perencanaan, aneka intervensi oleh pemerintah terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan lain-lain kegiatan yang sifatnya fundamental. Bagi mereka yang mempelajari kebijaksanaan pemerintah secara tuntas, maka secara teoritis akan mampu menjadi "*policy analyst*", sedangkan secara praktis akan mampu untuk membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan-kebijakan yang berkualitas.

Dalam menganalisa kebijakan pemerintah dapat digunakan teori-teori kebijakan. Teori kelembagaan memandang kebijakan sebagai aktivitas kelembagaan di mana struktur dan lembaga pemerintah merupakan pusat kegiatan politik. Lain halnya dengan teori kelompok yang memandang kebijakan sebagai keseimbangan kelompok yang tercapai dalam perjuangan kelompok pada suatu saat tertentu. Kebijakan pemerintah dapat juga dipandang sebagai nilai-nilai kelompok elit yang memerintah, demikian pandangan teori elit. Sedang teori rasional memandang kebijakan sebagai pencapaian tujuan secara efisien melalui sistem pengambilan keputusan yang tetap. Teori inkremental, kebijakan dipandang sebagai variasi terhadap kebijakan masa lampau atau dengan kata lain kebijakan pemerintah yang ada sekarang ini merupakan kelanjutan kebijakan pemerintah pada waktu yang lalu yang disertai modifikasi secara bertahap. Teori

permainan memandang kebijakan sebagai pilihan yang rasional dalam situasi-situasi yang saling bersaing. Sistem politik turut mewarnai kebijakan pemerintah, demikian pandangan teori sistem. Menurut teori sistem, lingkungan dipandang sebagai input dari sistem politik, sedangkan *public policy* dipandang sebagai output dari sistem politik. Teori kebijakan yang lain adalah teori campuran yang merupakan gabungan model rasional komprehensif dan inkremental.

Pembuatan kebijakan pemerintah adalah keseluruhan proses yang menyangkut pengartikulasian dan pendefinisian masalah, perumusan kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalah dalam bentuk tuntutan-tuntutan politik, pengaliran tuntutan-tuntutan tersebut ke dalam sistem politik, pengupayaan pemberian solusi-solusi, pengesahan dan implementasi, monitoring dan umpan balik. Ada tiga teori pengambilan keputusan yang dianggap paling sering dibicarakan dalam pelbagai keputusan kebijakan pemerintah yaitu Teori rasional komprehensif, teori inkremental dan teori pengamatan terpadu.

Proses pembuatan kebijakan tidak dapat dipisahkan dengan proses pengesahan kebijakan. Kedua-duanya memiliki hubungan yang sangat erat sekali sehingga tidak mungkin dipisahkan. Sekali suatu usulan kebijakan diberikan legitimasi oleh seseorang atau badan yang berwenang, maka usulan kebijakan itu berubah menjadi keputusan kebijakan yang sah (*legitimate*) dalam arti dapat dipaksakan pelaksanaannya dan bersifat mengikat. Bentuk kebijakan pemerintah dapat saja berbeda-beda tergantung pada penekanannya. Bentuk kebijakan tersebut telah dibuat tipologi umum untuk memudahkan kategorisasinya.

Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mau melaksanakan kebijakan pemerintah antara lain karena adanya respek anggota masyarakat terhadap otoritas pemerintah, adanya kepentingan pribadi dan adanya hukuman tertentu bila tidak melaksanakan kebijakan. Selain faktor tersebut di atas masih ada faktor mengapa orang tidak mematuhi atau tidak mau melaksanakan kebijakan pemerintah, antara lain karena bertentangan dengan sistem nilai masyarakat dan ketidakpastian hukum.

Implementasi kebijakan adalah aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, sebab proses implementasi kebijakan sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perumusan kebijakan. Akan tetapi sering terjadi *implementation gap* dalam pelaksanaan suatu kebijakan, di mana *implementation gap* merupakan kondisi adanya suatu perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan hasil atau kenyataan yang dicapai.

Proses implementasi suatu kebijakan dapat di analisa dari 3 (tiga) sudut pandang:

1. Pemrakarsa kebijakan/pembuat kebijakan (*the center*), di mana dari sudut pandang ini, melihat usaha-usaha yang dilakukan oleh pejabat-pejabat atasan atau lembaga-lembaga di tingkat pusat untuk mendapatkan kepatuhan dari lembaga-lembaga atau pejabat-pejabat di bawahnya/daerah atau untuk mengubah perilaku masyarakat/ kelompok sasaran.
2. Pejabat-pejabat di lapangan (*the periphery*) yaitu melihat tindakan para pejabat dan instansi-instansi di lapangan untuk menanggulangi gangguan-gangguan yang terjadi di wilayah keranya.

3. Kelompok sasaran (*target group*) yaitu memusatkan perhatian pada efektivitas dan efisiensi pelayanan atau Jawa yang diberikan pemerintah telah mengubah pola hidupnya.

Pengertian implementasi kebijakan yaitu:

1. Menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu dan berdampak terhadap sesuatu (kamus webster)
2. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu/pejabat-pejabat/kelompok-kelompok pemerintah atau swasta demi tercapainya tujuan yang digariskan dalam kebijakan (Pressman dan Wildavsky).
3. Kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan pemerintah, baik usaha administrasi atau untuk menimbulkan dampak pada masyarakat/ kejadian (Mazmanian dan Sabatier).

Proses implementasi kebijakan menyangkut perilaku badan-badan administrasi yang kompeten terhadap suatu program serta tanggung jawabnya pada program; dan menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, juga sosial yang mempengaruhi perilaku pihak-pihak yang terlibat sehingga berdampak sesuai harapan ataupun tidak sesuai harapan. Kebijakan pemerintah selalu mengandung paling tidak tiga komponen dasar yaitu: tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut (implementasi kebijakan).

Implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang

dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan di dalam kebijakan. Dengan demikian implementasi mulai berlangsung pada tahap penyusunan program. Meter dan Horn merumuskan sebuah abstraksi yang memperlihatkan hubungan antar berbagai faktor yang mempengaruhi hasil atau kinerja suatu kebijakan. Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tertentu. Menurut Grindle implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan meliputi: kepentingan yang dipengaruhi tipe manfaat, derajat perubahan yang diharapkan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program dan sumber daya yang dilibatkan. Sedangkan konteks implementasi terdiri dari: (1) kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat; (2) karakteristik lembaga dan penguasa; (3) kepatuhan dan daya tanggap.

Menurut Sabatier dan Mazmanian; implementasi kebijakan merupakan fungsi dari tiga variabel yaitu; (1) karakteristik masalah; (2) struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai macam peraturan yang mengoperasikan kebijakan, dan (3) faktor-faktor di luar peraturan. Setelah mengetahui kerangka pemikiran dari suatu studi implementasi, maka tugas evaluator berikutnya adalah mengetahui cara pengumpulan informasi/data melalui metode yang lazim yaitu: kuesioner, interview terbimbing maupun interview bebas dan mendalam dan analisis data sekunder. (Djopari, 2008).

2.2 Tinjauan Literatur

Dalam tinjauan literatur ini memuat berbagai penelitian yang telah dilakukan peneliti lain, dan permasalahan yang diangkat juga pernah dilakukan oleh beberapa peneliti lain, baik itu melalui pemelitian biasa ataupun skripsi. Yang mana mendasari pemikiran penulis dalam penyusunan skripsi ini, seperti oleh beberapa penelitian yang terdahulu yang dijadikan kajian pustaka yaitu sebagai berikut ;

Pertumbuhan ekonomi (PDRB) berpengaruh negatif dan signifikan dalam mengurangi kemiskinan, namun magnitude pengaruh tersebut relatif tidak besar. Inflasi maupun populasi penduduk juga berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, namun besaran pengaruh masing-masingnya relatif kecil. Peningkatan share sektor pertanian dan share sektor industri juga signifikan mengurangi jumlah kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi memang merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) untuk mengurangi kemiskinan. Syarat kecukupannya (*sufficient condition*). Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa kenaikan PDRB sebesar Rp 1 triliun akan mengurangi atau menurunkan jumlah orang miskin sekitar 9000 orang. (Siregar, 2007)

Pertumbuhan sebenarnya membantu masyarakat miskin : faktanya peningkatan pendapatan masyarakat sama dengan peningkatan pendapatan individu dalam jangka pendek, Globalisasi meningkatkan pendapatan, dan masyarakat miskin dapat berpartisipasi secara penuh. (The Economist , May 27, 2000).

Terlihat kondisi bahwa seberapa banyak orang miskin di dunia menerima manfaat dari pertumbuhan yang dipengaruhi oleh perdagangan bebas dan

investasi asing . Banyak artikel ekonomi berpandangan bahwa pertumbuhan dapat mengurangi kemiskinan, studi yang dilakukan Dollar dan Kray (2000) menemukan bahwa pendapatan rata-rata kuintil termiskin bergerak hampir satu-satu dari pendatan rata-rata keseluruhan. Direktur Kebijakan Oxam berpendapatan bahwa peningkatan ketimpangan pendapatan mencekik potensi masyarakat miskin, hal ini betentangan dengan Dollar dan Kraay. (Ravallion,2001)

Pencapaian tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dapat menurunkan angka kemiskinan lebih cepat. Hal ini terjadi terutama melalui pertumbuhan, yang menyebabkan peningkatan kerja dan upah riil yang lebih tinggi dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengurangan kemiskinan. Pendapatan minyak meningkat cepat sejak 1998 telah membantu secara signifikan peningkatan pertumbuhan produk domestik bruto dan pendapatan pemerintah di Kazakhstan. Bagian dari dana minyak digunakan untuk mendanai pensiun dan program perlindungan sosial yang telah membantu mengurangi kemiskinan. (Agrawal,2008).

Belanja pemerintah memiliki efek positif yang kuat terhadap pengurangan kemiskinan dari hasil regresi. Peningkatan pengeluaran pemerintah oleh satu persen cenderung mengurangi dengan 0,0188 persen jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan di provinsi di 1% tingkat signifikansi, memegang variabel lain konstan. Hal ini berpengaruh kuat mungkin karena pengeluaran pemerintah berfokus terutama pada investasi dalam infrastruktur serta program pengentasan kemiskinan. Hal ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan secara bersamaan. (Hung, 2006).

Akan tetapi menurut Dika Pratista Madyantara dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh pertumbuhan ekonomi, belanja modal, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2008. Menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, belanja modal tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, serta pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. (Madyantara, 2008)

Menurut Elfindri (2007) bahwa kebijakan dan strategi yang tepat dalam dalam mengentaskan kemiskinan di daerah adalah dengan memanfaatkan mesjid sebagai sarana dan wadah dalam mengentaskan kemiskinan di daerah. Dan menurut Mahdi (2005), kebijakan merupakan suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan tindakan yang terarah. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman atau petunjuk bagi setiap upaya atau kegiatan aparatur pemerintah maupun masyarakat agar kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah riset kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, literatur, penelitian terdahulu, dari internet dan data dari BPS yang berhubungan dan berkaitan yang nantinya akan berpengaruh untuk menunjang penyelesaian penulisan skripsi ini.

Variabel	Data	Sumber data
JPM	Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Agam	BPS
PDRB	Pertumbuhan PDRB di Kabupaten Agam	BPS
BM	Jumlah Belanja Modal Pemerintah di Kabupaten Agam	BPS

3.2 Metode Analisa

3.2.1 Pembentukan Model

Menurut Siregar, untuk melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia, adapun model yang dikemukakannya adalah terdapat hubungan linier antara PDRB, jumlah penduduk dan inflasi terhadap kemiskinan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka studi ini mencoba menggunakan model yang digunakan oleh Siregar tersebut dengan menggunakan variabel PDRB, belanja modal dan kebijakan pengentasan

kemiskinan sebagai variabel dummy untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten Agam.

Teknik analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis regresi dengan model penelitian sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + D + U \quad 3.1$$

Dimana :

Y	= Jumlah Penduduk Miskin
X1	= Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
X2	= Belanja Modal (BM)
D	= Dummy variabel kebijakan pemerintah 0 = tidak ada kebijakan penanggulangan kemiskinan 1 = ada kebijakan penanggulangan kemiskinan
β_0	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien regresi
U	= Faktor kesalahan

Berdasarkan penjelasan di atas maka model analisa dalam penelitian ini akan diambil dari teori produksi Cobb Douglas. Fungsi Cobb Douglas adalah persamaan yang melibatkan dua atau lebih variabel, dimana variabel yang satu disebut dengan dependen variabel dan yang lain disebut independen variabel, maka dapat dituliskan (Sukartawi, 1994):

$$Y = aX_1^{\beta_1} X_2^{\beta_2} \dots X_n^{\beta_n} e^u \quad 3.2$$

Apabila fungsi Cobb Douglas tersebut dinyatakan dalam hubungan Y dan X, maka dapat ditulis fungsinya:

$$Y = f(X_1, X_2, \dots, X_n) \quad 3.2$$

Dimana:

Y	= Variabel dependen
X	= Variabel independen

- a, β = Besaran yang akan diduga
 u = Kesalahan (disturbance term)
 e = Logaritma natural

Sedangkan untuk menganalisa pengaruh PDRB, Belanja Modal, dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Agam, maka digunakan fungsi Cobb Douglas sebagai berikut:

$$Y = f(X_1, X_2, X_3) \quad 3.3$$

$$Y = \beta_0 X_1^{\beta_1} X_2^{\beta_2} X_3^{\beta_3} e^u \quad 3.4$$

Untuk mengetahui besarnya masing-masing koefisien dalam model Cobb Douglas diatas, maka persamaan diatas ditransformasi ke dalam persamaan regresi linier berganda dalam bentuk:

$$\log Y = \log \beta_0 + \beta_1 \log X_1 + \beta_2 \log X_2 + \beta_3 \log X_3 + \log u \quad 3.5$$

Dimana:

- | | |
|-----------------------------|--|
| Y | = Jumlah Penduduk Miskin |
| X_1 | = PDRB |
| X_2 | = Belanja Modal |
| X_3 | = Dummy variabel kebijakan Penanggulangan Kemiskinan |
| β_0 | = Konstanta |
| $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ | = Koefisien regresi |

3.2.2 Definisi Operasional

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- a. Variabel dependen: Kemiskinan adalah suatu gejala yang terjadi disekitar lingkungan penduduk miskin dan biasanya dikaitkan dengan masalah kekurangan pendapatan

b. Variabel Independen, terdiri dari:

1) Pendapatan/PDRB (X)

Indikator *aggregate* ekonomi makro yang lazim digunakan untuk kondisi perekonomian suatu wilayah adalah PDB untuk nasional dan PDRB untuk daerah tingkat provinsi/kabupaten. Secara teori dapat dijelaskan bahwa PDRB merupakan bagian dari PDB sehingga dengan demikian PDRB merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pendapatan nasional.

2) Belanja Modal (X2)

Belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menimbulkan konsekuensi menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. (Halim, 2004).

3). Kebijakan Pemerintah (X3)

Kebijakan pemerintah merupakan wahana dari suatu pemerintah untuk secara rasional menguasai dan mengemudikan aktivitas-aktivitas sosial. Kegiatan-kegiatan dari kebijakan pemerintahan berwujud dalam kegiatan mengatur dan mengarahkan masyarakat, antara lain dengan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan, perencanaan, aneka intervensi oleh pemerintah terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan lain-lain kegiatan yang sifatnya fundamental. (Djopari, 2008)

3.3 Teknik Analisa

3.3.1 Analisa Deskriptif

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini, dimana untuk menjelaskan semua variabel yang diteliti baik variabel terikat dan variabel bebas dilakukan secara deskriptif dan kuantitatif, analisa secara deskriptif dilakukan dengan cara menginterpretasikan hasil olahan lewat tabulasi frekuensi guna menyingkap kecenderungan data nominal empirik dan deskripsi data, yang berguna untuk mengetahui keadaan interval berdasarkan hasil penelitian.

3.3.2 Analisa Kuantitatif

Untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi angka kemiskinan di Kabupaten Agam, juga dilakukan secara kuantitatif dengan regresi linear dengan SPSS 15 *for windows*. Dari regresi dihasilkan output statistik antara lain koefisien korelasi (R), koefisien determinasi (R^2).

3.4 Model Analisis dan Pengolahan Data

Analisis data yang dilakukan dengan metode regresi berganda, diolah dengan bantuan program SPSS. Analisis regresi pada dasarnya adalah studi atas ketergantungan suatu variabel yaitu variabel yang bergantung pada variabel yang lain yang disebut dengan variabel bebas dengan tujuan untuk mengestimasi dengan meramalkan nilai populasi berdasarkan nilai populasi berdasarkan nilai tertentu dari variabel yang diketahui (Gujarati, 2003). Fungsi dari penelitian ini adalah, Jumlah penduduk miskin = f) Produk Domestik Regional Bruto, Belanja

Modal, Dummy Variabel Kebijakan penanggulangan kemiskinan). Persamaannya adalah:

$$\text{Log JPM} = \beta_0 + \beta_1 \log \text{PDRB} + \beta_2 \log \text{BM} + \beta_3 D + u$$

Dimana:

JPM	= Jumlah Penduduk Kemiskinan
BM	= Belanja Modal
PDRB	= Produk Domestik Regional Bruto
D	= Dummy variabel kebijakan penanggulangan kemiskinan 0 = tidak ada kebijakan penanggulangan kemiskinan 1 = ada kebijakan penanggulangan kemiskinan
β_0	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien regresi
u	= Faktor kesalahan

3.5 Pengujian Model

Dalam melakukan analisa terhadap analisa regresi linear berganda dihasilkan output statistik koefisien determinasi (R^2), Uji F, Uji T, koefisien korelasi dan koefisien regresi.

1. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) akan memperlihatkan variasi pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent. Semakin tinggi R^2 akan semakin baik bagi model regresi, karena variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat lebih besar. Bila nilai R^2 mendekati 0 berarti sedikit sekali variasi variabel dependent yang dijelaskan oleh variabel independent. Jika nilai R^2 bergerak mendekati 1, berarti semakin besar presentase variasi variabel dependent yang dijelaskan oleh variabel independent. Jika dalam perhitungan $R^2 = 0$ maka hal ini menunjukkan

variasi variabel dependent tidak bisa dijelaskan oleh variabel independet (Gujarati, 1999).

2. Pengujian F (f -test)

Yaitu pengujian yang dilakukan dengan membandingkan nilai f hitung dengan f tabel. Nilai F hitung didapat dengan menggunakan model sebagai berikut:

$$f\text{-test} = \frac{R^2 / (k-1)}{(1-R^2) / (n-k)}$$

Dimana :

- R^2 = koefisien penentu berganda
- k = jumlah variabel bebas
- n = jumlah observasi
- $k-1$ = V_1 (*degree of freedom numerator*)
- $n-k$ = V_2 (*degree of freedom denominator*)

Pengujian ini bertujuan untuk ada tidaknya pengaruh seluruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas, dengan hipotesis sebagai berikut :

- $H_0 : \beta_i = 0$ berarti tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebasnya
- $H_a : \beta_i \neq 0$ berarti ada pengaruh variabel babas terhadap variabel tidak bebasnya

Keputusannya :

- Jika F hitung < F tabel, maka hipotesa nol diterima dan hipotesa alternatif ditolak berarti tidak ada hubungan secara signifikan variabel bebas dengan variabel tidak bebas

- Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka hipotesa nol ditolak dan alternatif diterima, berarti ada hubungan secara signifikan variabel bebas dengan variabel tidak bebas

Penerimaan terhadap hipotesa nol berarti variabel bebas yang diuji tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel tidak bebas, sedangkan penolakan terhadap hipotesa nol berarti variabel bebas yang diuji mempunyai pengaruh terhadap variabel tidak bebasnya.

3. Pengujian T (t-test)

Untuk menguji tingkat keberartian pengaruh masing-masing variabel bebas atau secara parsial dilakukan uji T atau *t test*. Jika tingkat signifikan kecil dari 0,05 maka model regresi dapat dipakai untuk pengujian sebaliknya jika tingkat signifikan besar dari 0,05 maka model regresi tidak dapat dipakai untuk pengujian. Secara statistik rumus yang digunakan untuk menghitung uji t ini adalah :

$$t_{(bi)} = \frac{b_i}{S_{(bi)}}$$

Dimana :

$$\begin{aligned} t_{(bi)} &= \text{nilai mutlak penguji} \\ b_i &= \text{koefisien regresi} \\ S_{(bi)} &= \text{standar deviasi } b_i \end{aligned}$$

Pengujian dilakukan untuk melihat keberartian dari masing-masing variabel secara terpisah tidak bebas dengan hipotesis statistik sebagai berikut :

- $H_0 : \beta_1 = 0$, berarti tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas.

- $H_0 : \beta_1 \neq 0$, berarti ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebasnya.

Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai t-hitung yang didapat dengan nilai t-tabel dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$, maka hipotesis nol diterima dan hipotesa alternatif ditolak berarti tidak ada hubungan secara signifikan variabel bebas dengan variabel tidak bebas.
- Jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$, maka hipotesis nol ditolak dan alternatif diterima, berarti ada hubungan secara signifikan variabel bebas dengan variabel tidak bebas.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Keadaan Geografis Kabupaten Agam

4.1.1 Kondisi Fisiografis

Kabupaten Agam terletak di Propinsi Sumatera Barat, tepatnya terletak antara 00°2' Lintang Selatan, dan 99°52' - 100°23' Bujur Timur dengan batas-batas wilayah:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pasaman
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten 50 Kota
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Tanah Datar
- Sebelah barat dengan Samudera Indonesia.

Kabupaten Agam mempunyai posisi yang strategis karena dilewati oleh jalur arteri primer yang menghubungkan Kota Padang dan Medan, maupun Pekanbaru. Secara fisiografis, kondisi Kabupaten Agam dapat ditinjau dari kondisi topografi, kemiringan lereng, morfologi, dan jenis tanah.

4.1.2 Kondisi Topografi

Secara keseluruhan, bentuk topografi kabupaten yang memiliki luas wilayah sebesar 2.232,30 Km² ini dapat dibedakan atas 4 bagian wilayah, yaitu:

- Wilayah datar dengan luas wilayah 662 Km².
- Wilayah datar berombak dengan luas 153 Km².
- Wilayah bukit dan bergunung seluas 616 Km².

- Wilayah datar berombak dan bergelombang seluas 801 Km².

Di Kabupaten Agam terdapat 2 buah gunung, yaitu Gunung Berapi di Kecamatan Banuhampu Sungai Puar dengan ketinggian 2.891 meter dan Gunung Singgalang di Kecamatan IV Koto dengan ketinggian 2.877 meter. Seperti dituturkan oleh Bupati Agam, Aristo Munandar, kabupaten ini terkenal sebagai salah satu kabupaten yang kaya. Kaya dengan berbagai potensi, mulai dari pegunungan, bukit, dataran bahkan memiliki danau. Danau Maninjau yang terletak di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, memiliki luas 9.950 Ha dengan kedalaman mencapai 157 meter dan keliling danau sepanjang 66 Km.

4.1.3 Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Agam pada tahun 20002 adalah 417.324 orang, terdiri dari 199.915 orang laki-laki dan 217.409 orang perempuan. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Lubuk Basung dengan 44.991 orang. Sedangkan yang terendah terdapat di Kecamatan Palupuh dengan 12.714 orang. Kecamatan yang penduduknya terpadat adalah Kecamatan Banuhampu Sungai Puar dengan kepadatan penduduk sekitar 732 orang per Km². Sementara, Kecamatan Pelupuh merupakan daerah terjarang penduduknya dengan kepadatan hanya 54 orang per Km².

4.2 Kondisi Perekonomian

Saat ini, perekonomian Kabupaten Agam dibentuk oleh sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pertambangan, pariwisata, dan industri. Kontribusi sektor-sektor tersebut cukup signifikan bagi kehidupan sosial budaya masyarakat di Kabupaten Agam. Kabupaten Agam berpotensi pada sektor perkebunan, terutama dengan komoditi andalannya, yaitu kelapa sawit. Komoditi andalan lainnya adalah hasil laut. Nilai ekspor yang diperoleh dari kelapa sawit cukup tinggi, karena permintaan akan kelapa sawit di pasaran internasional juga cukup tinggi. Sedangkan Industri yang berkembang di Kabupaten Agam umumnya merupakan industri yang menunjang kegiatan pariwisata, seperti industri kerajinan dan cenderamata.

4.3 JPM (Jumlah Penduduk Miskin)

Berdasarkan data BPS tahun 1999-2008, Kabupaten Agam memiliki Jumlah Penduduk miskin tertinggi yakni pada tahun 2001, yaitu berjumlah 62.780 jiwa. Pada tahun 2001, secara nominal terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar 11.380 jiwa, dimana tahun 2000 berjumlah 51.400 jiwa penduduk miskin naik menjadi 62.780 jiwa. Pada Tahun 2002 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 9280, yakni dari 62.780 pada tahun 2001, menjadi 53.500 pada tahun 2002. Kenaikan jumlah penduduk miskin terus terjadi hingga tahun 2006 yakni berjumlah 59.400 jiwa, setelah sempat mengalami penurunan pada tahun 2005 yang berjumlah 56.000 jiwa. Penurunan terus terjadi hingga tahun 2008 yang berjumlah 45.300 jiwa penduduk miskin.

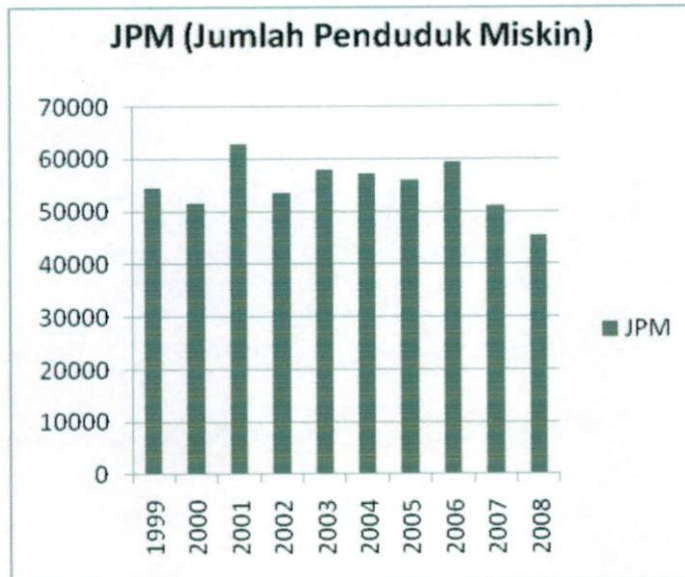
Tabel 4.1
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin (JPM)
Kabupaten Agam Tahun 1999 – 2008

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK MISKIN	PERSENTASE PERUBAHAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN
1999	54.500	-19,88%
2000	51.400	-5,69%
2001	62.780	22,14%
2002	53.500	-1,48%
2003	57.900	8,23%
2004	57.200	-1,21%
2005	56.000	-2,10%
2006	59.400	6,07%
2007	51.100	-13,97%
2008	45.300	-11,35%
Rata-rata	54.908	-3,25%

Sumber: BPS Propinsi Sumatera Barat

Grafik 4.1

**Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin (JPM)
Kabupaten Agam Tahun 1999 – 2008**



Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia

Persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Agam selalu mengalami fluktuasi naik turun dari tahun ke tahun. Pada tahun 1999 persentase jumlah penduduk miskin -19,88% dan menurun pada tahun 2000 menjadi -5,69%, namun pada tahun 2001 meningkat secara signifikan hingga mencapai 22,14%. Sedangkan pada tahun selanjutnya terus mengalami penurunan hingga mencapai -1,21% pada tahun 2004. Pada tahun-tahun berikutnya persentase jumlah penduduk miskin terus mengalami fluktuasi hingga mencapai -11,35% pada tahun 2008. Secara rata-rata persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Agam dari tahun 1999 hingga 2008 adalah -3,25%

4.4 Pertumbuhan PDRB

Berdasarkan data BPS tahun 1999-2008, Kabupaten Agam memiliki Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan tertinggi yakni pada tahun 2008, sebesar Rp. 2.793.690.000. Pada tahun 2000, secara nominal terjadi kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan sebesar Rp. 50.582.000. dimana tahun 1999 sebesar Rp. 1.750.106.000 naik menjadi Rp. 1.800.687.000 kenaikan PDRB secara signifikan terjadi hingga pada tahun 2003 yakni menjadi Rp. 2.066.650.000 kenaikan terus terjadi hingga tahun 2008 yakni menjadi Rp. 2.793.690.000. Produktifitas ekonomi Kabupaten Padang Pariaman secara riil dapat dilihat dari perkembangan nilai PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan 2000 yang laju pertumbuhan ekonominya 19,01 persen di tahun 2006.

Tabel 4.2

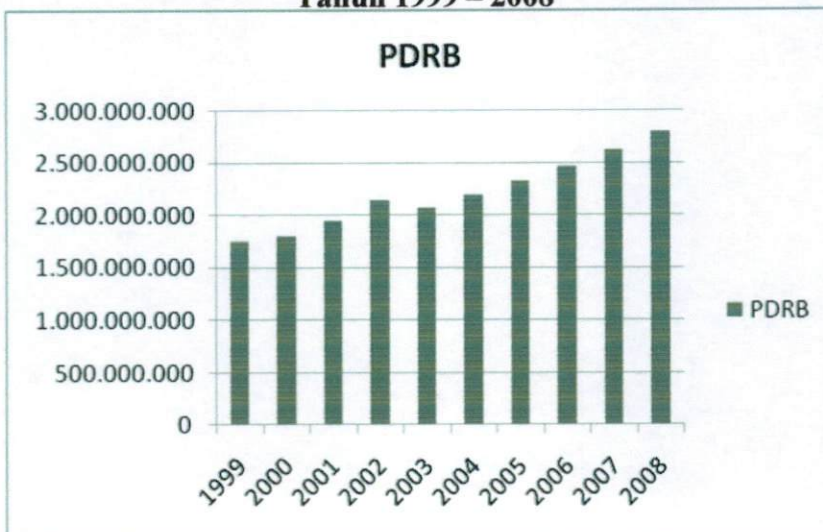
**Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Berdasarkan harga konstan (2000= 100) Kabupaten Agam
Tahun 1999 – 2008**

TAHUN	PDRB	PERTUMBUHAN EKONOMI
1999	1.750.106.800	-7,92
2000	1.800.687.900	2,89
2001	1.949.860.100	8,28
2002	2.139.475.200	9,72
2003	2.066.650.000	-3,40
2004	2.190.820.000	6,01
2005	2.325.160.000	6,13
2006	2.468.760.000	6,18
2007	2.626.070.000	6,37
2008	2.793.690.000	6,38
Rata-rata	2.211.128.000	4,06%

Sumber: BPS Propinsi Sumatera Barat

Grafik 4.2

**Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Berdasarkan harga konstan (2000= 100) Kabupaten Agam
Tahun 1999 – 2008**



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia

Pada tahun 2000 PDRB Kabupaten Agam sudah mencapai sebesar Rp. 1,8 milyar, dan secara rata-rata selalu mengalami peningkatan sampai tahun 2008. Peningkatan jumlah PDRB tidak diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi, terlihat pada tabel diatas bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Agam selalu berfluktuasi. Pada tahun 1999 dan 2003 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Agam mengalami penurunan mencapai titik -7,92% dan -3,40%, sedangkan pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2002 yaitu mencapai 9,72%. Kemudian pada tahun 2004 sampai tahun 2008 meskipun dalam kondisi perekonomian yang sulit akibat dari krisis ekonomi global, namun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Agam ternyata selalu mengalami peningkatan dan relatif tinggi yaitu mencapai sebesar 6,38%. Selama periode tahun 1999–2008 pertumbuhan ekonomi Kota Padang secara rata-rata mencapai sebesar 4,06 %.

4.5 Belanja Modal (BM)

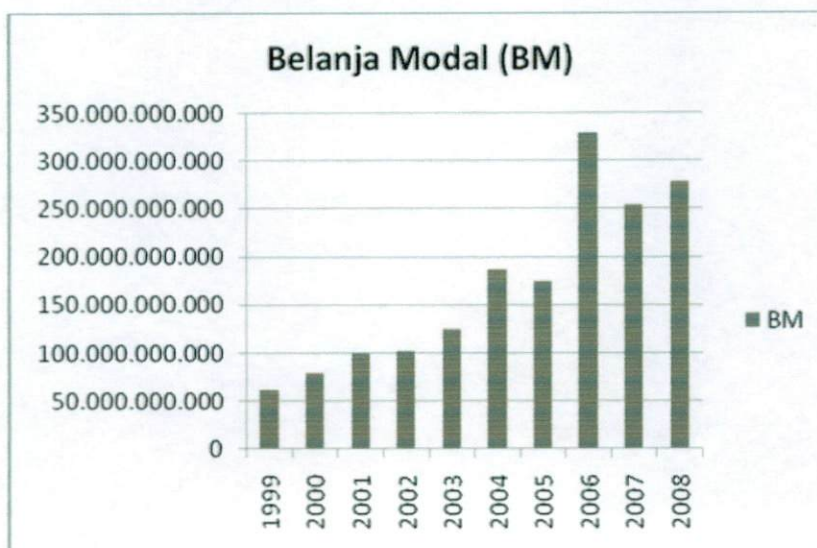
Berdasarkan data BPS tahun 1999-2008, pertumbuhan Belanja Modal di Kabupaten Agam setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan dimana tingkat tertinggi terjadi pada tahun 2006, dan terendah pada tahun 1999. Meskipun demikian pada tahun-tahun tertentu belanja modal tumbuh negatif hingga mencapai angka -23% dimana ini terjadi pada tahun 2007. Kondisi ini merupakan pertumbuhan terendah selama periode 1999-2008, hal ini terjadi dikarenakan pada tahun 2007 ini dari dana APBD yang ada, sebagian besar lebih dititik beratkan untuk belanja tidak langsung pemerintah dan sisanya dialokasikan untuk belanja langsung (belanja modal) pemerintah.

Tabel 4.3
Perkembangan Belanja Modal (BM)
Kabupaten Agam Tahun 1999 – 2008

Tahun	BM	PERTUMBUHAN BELANJA MODAL
1999	61.143.733.045	-
2000	79.647.519.638	30%
2001	98.781.293.456	24%
2002	102.462.713.231	4%
2003	124.810.354.756	22%
2004	187.032.201.145	50%
2005	174.519.110.837	-7%
2006	328.953.336.716	88%
2007	254.235.874.851	-23%
2008	277.938.259.291	9%
Rata-rata	168.952.439.696,60	22%

Sumber: BPS Propinsi Sumatera Barat

Grafik 4.3
Perkembangan Belanja Modal (BM)
Kabupaten Agam Tahun 1999 – 2008



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia

Berdasarkan tabel di atas jumlah Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Agam tahun 1999-2008 pada umumnya mengalami kenaikan tiap tahunnya, dimana jumlah Belanja Modal tahun 1999 yang hanya sebesar Rp 61.143.733.045, pada tahun 2006 mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi mencapai 88% dengan nominal Rp 328.953.336.716. Namun pada tahun 2007 mengalami pertumbuhan yang negatif hingga mencapai angka -23% dengan angka nominal Rp 254.235.874.851. Walaupun demikian secara rata-rata pertumbuhan belanja modal periode 1999-2008 menunjukkan pertumbuhan yang positif yaitu sebesar 22%

4.6 Kebijakan Kemiskinan

Masalah kemiskinan, kelaparan dan keterbelakangan yang selama ini hidup dibawah kemiskinan dunia hingga menimbulkan perbedaan yang tajam antara masyarakat miskin dan masyarakat kaya.

Untuk menghadapi masalah kemiskinan tersebut berbagai upaya terus dilakukan pemerintah. Program penanggulangan kemiskinan adalah suatu upaya yang dilaksanakan Pemerintah dengan mengakomodasi berbagai sektor secara sinergis, komprehensif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan di Indonesia yang meliputi program JPS-BK, JPS- Pendidikan, Inpres Desa Tertinggal, PDT, KUT, PDM-MK, UED-SP, PDM- DKE, Bansos, PMT-AS, UP2WK dan lain-lainnya.

Semua program diatas dilaksanakan dengan suatu sistim Nasional, dimulai dari aspek perencanaan, operasional dan pengendalian menggunakan sistim nasional bahkan evaluasi juga dilakukan secara nasional.

Walaupun berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dilakukan, namun permasalahan kemiskinan di Kabupaten Agam masih belum berakhir.dan

hanya dapat memecahkan persoalan kemiskinan dalam jangka pendek. Disamping itu target group sebagai sasaran program sering tidak pada sasaran yang semestinya menerima, sekaligus pemanfaatan dari bentuk pelayanan itu sendiri (Achmadi, 2004). Sementara sistem penanggulangan kemiskinan secara dimanis; berupa pengembangan usaha produktif serta bentuk dukungan kelembagaan dan pendampingan, diduga juga sering belum optimal, baik manfaat maupun outcomes dari kegiatannya (ADB, 2004; Lindenthal, 2004; P2-LIPI, 2004). Sementara setiap tahunnya program penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan dan sangat sulit sampai kepada sebuah kesimpulan pengurangan kemiskinan sebagai kensekuensi dari kebijakan yang telah dilakukan (Elfindri, Mahdi & Wiko Saputra, 2005)

Dalam jangka pendek, prioritas penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk menjaga stabilitas kehidupan masyarakat miskin akan jebakan kemiskinan “*Poverty trap*” yang dapat bergeser bila kehidupan makro ekonomi dalam keadaan labil sehingga sedikit saja terjadi gejolak ekonomi makro akan berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat miskin (Suryahardi, Suharso & Sumarto, 1999; Worl Bank, 2003; Elfindri, Mahdi & Wiko Saputra, 2005)

Dengan tidak berakhirnya masalah kemiskinan ini mungkin saja disebabkan oleh permasalahan ekonomi (pendapatan masyarakat yang masih rendah) sehingga berdampak terhadap berbagai segi kehidupan. Selain itu rendahnya tingkat kesehatan masyarakat dan gizi balita, kurangnya akses sektor informal dan rumah tangga terhadap perbankan dan sumber dana, tingginya angkatan kerja yang belum bekerja, masih adanya perkampungan yang jauh dari

akses perhubungan dan berfungsinya fasilitas pelayanan ekonomi dan sosial terhadap pertumbuhan merupakan suatu hal yang harus dapat diatasi.

Di samping itu juga belum dimanfaatkannya fungsi-fungsi pelayanan sosial dan ekonomi untuk menggerakkan potensi masyarakat sehingga masyarakat juga tidak melihat pentingnya keberadaan fungsi-fungsi pelayanan sosial tersebut dalam lingkungannya.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Agam Nomor 18 Tahun 2006 Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan maka dimulailah upaya-upaya Penanggulangan kemiskinan Berbasis Mesjid di Kabupaten Agam. Langkah awal yang dilakukan dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan oleh Pemerintah Kabupaten Agam adalah dengan menerapkan dua pola pendekatan yaitu :

a. Pendekatan Langsung terhadap setiap rumah tangga

Seperti pemberian Raskin, Askeskin, Beasiswa, Perbaikan Rumah, Alat-alat produksi, dan Permodalan.

b. Pendekatan pembangunan daerah tertinggal dan miskin

Dalam pelaksanaan pola pendekatan ini terlebih dahulu harus ditetapkan daerah-daerah termasuk kategori tertinggal dan miskin.

Untuk itu pelaksanaan penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan secara terintegrasi antara pemerintah dengan semua elemen masyarakat yang terakumulasi dalam kenagarian sebagai satu kesatuan masyarakat Adat yang bersandi Syara' dan Syara' basandi Kitabullah. Dalam upaya membangun kepedulian masyarakat serta meningkatkan peran, partisipasi dan kapasitas kepala

kaum, kepala suku, perantau serta lembaga adat di nagari bersinergi dalam penanggulangan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Sasaran yang dituju dari pelaksanaan penanggulangan kemiskinan berbasis mesjid di Kabupaten Agam adalah :

- a. Agar dapat terfokusnya kegiatan penanggulangan rumah tangga miskin untuk lebih cepat meningkatkan taraf hidup anggota Rumah Tangga Miskin dan pada gilirannya masyarakat terbebas dari belenggu kemiskinan.
- b. Meningkatkan peran dan partisipasi dari organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan lembaga lainnya dalam pembangunan.
- c. Meningkatkan peran Ninik Mamak, pimpinan adat, dan pimpinan suatu kaum dan suku dalam peningkatan kapasitas anak kemenakan.
- d. Terarahnya sistim penanggulangan kemiskinan

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil dan Persamaan Regresi

Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Belanja modal dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang berlaku terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten Agam, maka penelitian ini akan menggunakan metode regresi berganda yang diolah dengan program SPSS 15. Oleh karena datanya cukup besar, maka agar memudahkan perhitungan dan analisis, data yang akan diolah terlebih dahulu dilogkan (dalam bentuk log linier), kecuali data variabel kebijakan penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan perhitungan maka diperoleh persamaan regresinya sebagai berikut :

$$\text{LogJPM} = 15,17 - 1,39 \log \text{PDRB} + 0,22 \log \text{BM} + 0,08 \text{KEBJ}$$

(8,471) (-5,336) (3,233) (4,231)

$$R^2 = 0,867$$

$$\text{Adjusted } R^2 = 0,801$$

$$F = 13,051$$

$$\text{DW} = 2,140$$

Besarnya kontribusi antara Produk Domestik Regional Bruto, Belanja modal, dan kebijakan penanggulangan kemiskinan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Agam tahun 1999-2008 secara bersama-sama dapat diketahui dari nilai koefisien determinasi yang disesuaikan atau adjusted R Square (karena variabel independen lebih dari dua). Besarnya adjusted R Square berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS 15 diperoleh sebesar 0,801. Dengan demikian besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel Produk

Domestik Regional Bruto, belanja modal dan kebijakan penanggulangan kemiskinan terhadap jumlah penduduk miskin di kabupaten tahun 1998-2008 secara bersama-sama adalah sebesar 80,10%. Sedangkan sisanya sebesar 19,90 dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Hasil persamaan regresi menunjukkan bahwa, koefisien elastisitas Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar minus 1,39. Tanda negatif menunjukkan hubungan PDRB dengan jumlah penduduk miskin berhubungan negatif. Artinya jika terjadi peningkatan 1% PDRB akan menyebabkan penurunan terhadap jumlah penduduk miskin sebesar 1,39%. Koefisien elastisitas Belanja modal (BM) adalah sebesar 0,22. Tanda positif menunjukkan hubungan belanja modal dengan jumlah penduduk miskin berhubungan positif, peningkatan 1% belanja modal akan menyebabkan peningkatan terhadap jumlah penduduk miskin sebesar 0,22%. Sedangkan untuk kebijakan penanggulangan kemiskinan yang ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi memperlihatkan tanda positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika ada kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah selama periode tersebut maka akan mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar 0,08%.

5.1.1 F- Test

Hasil uji F-test berguna untuk melihat pengaruh variabel independen secara keseluruhan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Jika nilai $F\text{-test} > F\text{-tabel}$, dan begitu sebaliknya, variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen jika nilai $F\text{-test} < F\text{-tabel}$.

Dari hasil penelitian didapatkan nilai F-test sebesar 13,051, sedangkan F tabel dihitung dengan cara $df_1 = k-1$, dan $df_2 = n-k$, dimana k adalah jumlah variabel dependen dan independen, sedangkan n adalah jumlah data, sehingga didapatkan nilai F tabel_(3,6) sebesar 4,76. Hal ini menunjukkan nilai F-test > pengaruh F-tabel, dan bisa dinyatakan bahwa secara bersama-sama (keseluruhan), jumlah penduduk miskin dipengaruhi oleh produk domestik regional bruto, belanja modal, dan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

5.1.2 T- test

Uji t adalah pengujian koefisien regresi secara individual dan untuk mengetahui dari masing-masing variabel dalam mempengaruhi variabel dependen dengan menganggap variabel lain konstan atau tetap. Masing-masing variabel independen secara individual (parsial) mempengaruhi variabel dependen jika $t\text{-test} > t\text{-tabel}$, dan begitu sebaliknya, masing-masing variabel independen secara individual (parsial) tidak mempengaruhi variabel dependen jika $t\text{-test} < t\text{-tabel}$.

Dari hasil regresi diperoleh $t\text{-test PDRB} = -5,336$, $t\text{-test BM} = 3,233$, $t\text{-test KBJ} = 4,231$, sedangkan t-tabel dihitung dengan cara $\alpha = \alpha/2$, $v = n-k$, sehingga didapatkan nilai T-tabel _(0,025,6) sebesar 2,447, oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa:

1. Produk domestik regional bruto (PDRB) secara statistik signifikan dalam mempengaruhi jumlah penduduk miskin sebab $t\text{-test} > t\text{-tabel}$
2. Belanja modal (BM) secara statistik signifikan dalam mempengaruhi jumlah penduduk miskin sebab $t\text{-test} > t\text{-tabel}$

3. Kebijakan penanggulangan kemiskinan secara statistik signifikan dalam mempengaruhi jumlah penduduk miskin sebab $t\text{-test} > t\text{-tabel}$

5.2. Hasil Uji Asumsi Klasik

5.2.1. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Pengujian adanya multikolinearitas dilakukan dengan memperhatikan besarnya *tolerance value* dan besarnya VIF. Jika nilai *tolerance value* $> 0,1$ dan $VIF < 10$, maka tidak terjadi multikolinearitas.

Dari tabel diatas terlihat bahwa nilai tolerance dan nilai VIF menunjukkan tidak ada satu variabel yang memiliki nilai VIF lebih dari 10 dan nilai tolerance juga menunjukkan tidak satu variabel bebas yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 10 persen (atau mendekati 1), dan ini berarti tidak ada korelasi antar variabel bebas. Hasil ini menandakan bahwa model regresi yang dihasilkan tidak terjadi multikolinieritas dan baik untuk digunakan. Berdasarkan hasil penghitungan dengan SPSS didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 5.1
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Produk domestik regional bruto	0,114	8,734
Belanja modal	0,121	8,282
Kebijakan	0,491	2,038

Sumber : Perhitungan SPSS 15

5.2.2. Uji Autokorelasi

Untuk autokorelasi digunakan untuk menguji ada atau tidaknya kesalahan pengganggu pada periode tertentu dengan kesalahan pada periode sebelumnya dalam model regresi. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah dengan cara membandingkan nilai Durbin Watson (Dw) dengan nilai d_l dan d_u pada tabel Durbin Watson. Secara umum bisa diambil patokan bahwa jika nilai Dw berada antara 2 dan 4, maka tidak ada terdapat masalah autokorelasi (Santoso, 2000). Nilai Dw pada penelitian ini adalah 2,140, maka tidak ada masalah autokorelasi dalam penelitian ini.

5.4.3. Uji Heteroskedastisitas

Dari hasil SPSS dapat dilihat bahwa :

1. Titik-titik pada Scatterplot tidak mengumpul hanya dibagian atas atau dibawah saja
2. Penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali,
3. Penyebaran titik-titik data tidak berpola.

Dari uraian tersebut terlihat bahwa model yang digunakan terbebas dari masalah heterokedastisitas.

5.3. Implikasi dan Kebijakan

Hasil penelitian ini hendaknya memberikan manfaat sebagai penganmbil kebijakan dalam pengentasan kemiskinan di kabupaten Agam.

Adapun implikasi kebijakan dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di kabupaten Agam. Dalam hasil regresi didapatkan koefisien elastisitas PDRB sebesar -1,39. Nilai ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% PDRB akan menyebabkan penurunan terhadap jumlah penduduk miskin sebesar 1,39%. Hal ini sesuai dengan teori Okun (Hukum Okun) yang menyatakan bahwa setiap kenaikan PDRB (Pertumbuhan Ekonomi) akan menurunkan pengangguran, dalam artian kenaikan PDRB (Pertumbuhan Ekonomi) akan mengurangi jumlah penduduk miskin.
2. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa variabel belanja modal berpengaruh positif terhadap kemiskinan di kabupaten Agam. Dalam hasil regresi didapatkan koefisien elastisitas belanja modal sebesar 0,22. Nilai ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% belanja modal menyebabkan kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar 0,22%. Hasil ini bertolak belakang dengan hipotesis sebelumnya yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Sesuai dengan hasil temuan Dika Pratista Madyantara, 2008 yang menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan.

Hal ini mungkin saja disebabkan dalam pengalokasian belanja modal dalam APBD Kabupaten Agam tidak berorientasi kepada pengurangan kemiskinan di Kabupaten Agam, akan tetapi lebih dititikberatkan kepada biaya operasional pemerintahan.

3. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel dummy (kebijakan) berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Agam. Dalam hasil regresi didapatkan koefisien elastisitas variabel dummy (kebijakan) sebesar 0,08. Nilai ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% kebijakan pemerintah akan menyebabkan penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 0,08%. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Agam, maka dukungan pemerintah merupakan faktor yang sangat penting bagi terealisasinya maksud dan tujuan tersebut. Seperti dalam hal pengalokasian dana dan berbagai program pengentasan kemiskinan yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga dalam jangka panjang dapat menurunkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Agam. Kebijakan tersebut harus didukung dengan evaluasi oleh pemerintah dan implementasi oleh masyarakat yang bersangkutan. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat sejauhmana hasil implementasi kebijakan yang dijalankan dan hasil kualitas pelayanan. Ini sesuai juga dengan pendapat Elfindri (2006), dalam bukunya Makmur Bersama Mesjid mengemukakan bahwa strategi yang tepat dalam mengentaskan kemiskinan di daerah adalah dengan meningkatkan dukungan pemerintah

daerah, evaluasi serta partisipasi masyarakat dalam megentaskan kemiskinan didaerah.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada penelitian ini, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Nilai koefisien determinasi yang disesuaikan (*adjusted r square*) sebesar 80,1% menunjukkan bahwa secara statistik jumlah penduduk miskin di Kabupaten agam dipengaruhi oleh variabel Produk Domestik Regional Bruto, belanja modal dan kebijakan penanggulangan kemiskinan, sisanya 19,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.
- b. PDRB memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap jumlah kemiskinan di Kabupaten Agam, hal ini ditunjukkan dari koefisien elastisitas variable PDRB dalam persamaan regresi sebesar -1,39, berarti jika terjadi kenaikan terhadap PDRB sebesar 1% maka akan menyebabkan penurunan jumlah penduduk miskin kabupaten agam sebesar 1,39%.
- c. Belanja modal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di kabupaten agam, yang ditunjukkan oleh koefisien elastisitas variable Belanja Modal dalam persamaan regresi sebesar 0,22, berarti jika terjadi kenaikan belanja modal sebesar 1% akan menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin Kabupaten agam sebesar 0,22%. Hal ini disebabkan Karena belanja modal lebih utama dialokasikan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka

pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya, belum sepenuhnya dialokasikan untuk program pengentasan kemiskinan.

4. Dummy variabel kebijakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Agam. Hal ini karena kebijakan atau dukungan pemerintah daerah merupakan suatu program pencapaian tujuan/nilai serta tindakan yang terarah dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh pihak-pihak terkait dan diterapkan oleh yang berwenang. Untuk dijadikan pedoman/petunjuk bagi setiap upaya atau kegiatan aparatur pemerintah maupun masyarakat agar kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik.

6.2. Saran

Dari hasil penelitian diatas maka dapat diajukan saran-saran untuk meningkatkan peran serta masyarakat yang bersama-sama melakukan kegiatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Agam yaitu :

- a. Disarankan kepada pemerintah daerah Kabupaten Agam agar pengalokasian PDRB lebih efisien dan tepat sasaran, terutama kepada

penciptaan lapangan kerja baru sehingga mengurangi pengangguran yang pada akhirnya dapat mengurangi kemiskinan di Kabupaten Agam.

- b. Dari hasil penelitian di atas diketahui bahwa belanja modal belum mampu untuk menurunkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Agam. Untuk itu disarankan kepada pemerintah daerah Kabupaten Agam agar belanja modal tersebut benar-benar dialokasikan kepada program-program pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan dan tepat sasaran.
- c. Kebijakan-kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan di Kabupaten Agam sebaiknya lebih ditingkatkan pada sektor riil, seperti pemberian modal usaha kepada masyarakat agar dapat meningkatkan perekonomiannya. Serta diperlukannya monitoring dan evaluasi dari kebijakan penanggulangan kemiskinan tersebut.
- d. Disarankan kepada penelitian berikutnya agar mengetahui variabel lain yang paling berpengaruh terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Agam selain PDRB, belanja modal dan kebijakan pemerintah yang nantinya berguna untuk menentukan kebijakan apa yang tepat untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di Kabupaten Agam.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, 2004. *Perencanaan dan Penganggaran Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah: Kasus Sulawesi Selatan*, disampaikan dalam loka karya *Perencanaan dan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah*. Makasar.
- ADB, 2004. *Fighting Poverty in Asia and Pacifik : The Poverty Reduction Strategy*. Asian Development Bank Report.
- Agrawal, Pradeep. 2008. *Economic Growth and Poverty Reduction: Evidence from Kazakhstan*.
- Agussalim, 2005. *Sanggupkah Pengeluaran Pemerintah Mereduksi Kemiskinan*. Universitas Hasanudin
- Arsyad, Lincolyn. 1997. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi ke-3, STIE YPKN.
- Badan Pusat Statistik. 1998-2008. *Statistik Indonesia*. BPS Indonesia.
- Bland, Robert & Samuel Nunn. 1992. *The impact of capital spending on municipal operating budgets*. Public Budgeting & Finance (Summer):
- Djopari, Johannes Rudolf Gerzon. 2008. *IPEM4538 Kebijakan Pemerintah*. Indonesia
- Draf Ringkasan, 2005. *Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia*.
- Elfindri, Mahdi dan Wiko Saputra, 2005. *Kajian Tingkat Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan Sumatera Barat*, Kopertis Wilayah X, Padang.

- Elfindri, 2007. *Evaluasi program Penanggulangan Kemiskinan : Desain dan Implementasi*. Kopertis Wilayah X, Padang.
- Elfindri, 2008. *Makmur Bersama Mesjid*.
- Esmara, Hendra. 1986. *Perencanaan dan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta:PT Gramedia.
- Gujarati, Damodar. 1999. "*Ekonometrika Dasar*". Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta, Salemba Empat.
- Hung, Trang Trong. 2006, *Impacts of Foreign Direct Investment on Poverty Reduction in Vietnam*. Vietnam.
- Madyantara, Dika Pratista. 2008. *Pengaruh pertumbuhan ekonomi, belanja modal, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa Tengah*. UNNES. Jawa Tengah.
- Mankiw, N. Gregory. 2003, "*Teori Makroekonomi*" Erlangga, Jakarta
- Monisfar dalam www.canduang.com. *Sebuah Analisis Strategis "PENGENTASAN KEMISKINAN" di Kecamatan Canduang*
- Pemerintah Kabupaten Agam, 2006. *Strategi Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Agam*. Lubuk Basung
- Putra, I Dewa Gede Agung Diasana, 2007. *Pemenuhan Atas Perumahan Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan*. FE-UU. Bali.
- Ravallion, Martin. 2001, *Growth, Inequality and Poverty: Looking Beyond Averages*. World Bank, Washington, DC, USA.

- Sitepu, Rasyidin K. dan Bonar M. Sinaga, 2004. *dampak investasi sumberdaya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di indonesia: pendekatan model computable general equilibrium*. FE-IPB, Bogor.
- Siregar, Herman, 2007. *Dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin*. IPB & Brighten Institute
- Sukartawi, 1995. *Teori Ekonomi Produksi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo
- Syaiful, 2006. *Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan*.
- Tambunan, Tulus. 2001, *Perekonomian Indonesia : Teori dan Temuan Empiris*. Penerbit PT. Ghalia Indonesi, Jakarta.
- Todaro, Michael P.2000. *Pembangunan Dunia Ketiga*. Edisi ketujuh .Jilid III. Jakarta: Erlangga.
- World Bank (2004). World Development Report 2004. "Making Better Services for the Poor" Oxford University Press.
- Yakub, Yuzirwan. (2005). *Karakteristik Rumah Tangga Miskin Di Kota Padang Sebelum dan Sesudah Krisis Ekonomi Tahun 1998*. Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Andalas, Padang.